



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Februari 2021

Halaman: 1

Lumbung Mataram Atasi Kemiskinan

JOGJA-Lumbung Mataram dijadikan strategi Kota Jogja untuk mengatasi kemiskinan yang meningkat akibat pandemi Covid-19.

Jalu Rahman Dewantara, Ujang Hasanudin, & Luqas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

Adapun Pemda DIY akan mengandalkan sejumlah proyek besar infrastruktur seperti Jalan Tol Jogja-Solo (Joglo), Tol Jogja-Bawen, dan Kereta Bandara untuk meningkatkan perekonomian

► Pemkot Jogja telah menyiapkan berbagai strategi pengentasan kemiskinan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan (Danais) maupun APBD.

► Pemda DIY mengandalkan proyek besar dan padat karya untuk menekan jumlah penduduk miskin.

masyarakat. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di DIY saat ini mencapai 503.140 orang, atau naik sekitar 27.000 dari Maret 2020 lalu. Jika dipersentase

kenaikan ini sebesar 5,76%. Sementara itu, berdasarkan provinsi, rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi masih diduduki DIY yakni sebesar 0,43.

Selain Lumbung Mataram, Pemkot Jogja telah menyiapkan berbagai strategi pengentasan kemiskinan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan (Danais) maupun APBD. Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan terdapat tiga strategi pengentasan kemiskinan dari alokasi Danais, yakni pengembangan Lumbung Mataram yang sudah ada enam lokasi. Tiga lokasi di antaranya adalah Kalurahan Blunyahrejo, Kemantren

Tegalrejo; Kalurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, dan Suryodiningratan, Kemeatren Mantrijeron.

Heroe mengatakan Lumbung Mataram merupakan kegiatan berupa pembinaan wilayah sampai benar-benar mampu memproduksi hasil pangannya secara mandiri. Program tersebut nantinya juga berkolaborasi dengan kampung sayur yang sudah ada di 200 titik di wilayah Jogja. "Danais sebagian dipakai untuk satu pengembangan bidang pertanian Lumbung Mataram untuk membantu masyarakat dalam hal ketahanan pangan," kata Heroe di ruang kerjanya, Selasa (16/2).

Selain Lumbung Mataram, Pemkot juga sudah menyiapkan bantuan untuk seniman berikut kegiatannya. Dia menginginkan seniman juga tetap berkarya di tengah pandemi, tetap mengacu pada protokol kesehatan. "Sekarang konsentrasi seni budaya jalan dan *event* prokes Covid-19 juga jalan," ujar Heroe.

Kemudian ketiga adalah penataan kawasan. Menurut dia, penataan kawasan yang dilakukan di Jogja dengan Danais semata-mata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,

► Halaman 11

anjut

Lumbung Mataram...

Namun demikian politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak menyebutkan berapa alokasi DanaIS untuk pengentasan kemiskinan. Selain melalui DanaIS, kata Heroe, APBD juga digunakan untuk pengentasan kemiskinan, di antaranya dengan pemberdayaan warga. Berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Jogja harus menggunakan tenaga atau sumber daya masyarakat sekitar.

Pemkot juga tengah mengkolaborasi kampung sayur dan hasil budi daya pertanian dan perikanan untuk disuplai pada E-Warong dalam mencukupi kebutuhan warga yang mendapat bantuan program keluarga harapan.

Kedua, mengurangi beban masyarakat, salah satunya dengan menggratiskan sejumlah layanan dan menambah pengeluaran pulsa dengan memperbanyak kampung Wifi. "Sekarang sudah ada 300 titik Wifi, kami targetkan pertengahan tahun semua tersambung Internet," kata Heroe.

Ketiga, mempertahankan agar tidak terjadi inflasi yang dapat membebani masyarakat.

Heroe mengatakan angka kemiskinan di Jogja naik 6,7% pada 2020 lalu, dan 7,25% pada 2021. Tingginya angka kemiskinan karena sebagian besar ekonomi masyarakat di Jogja mengandalkan sektor pariwisata dan pendidikan. Sementara sektor pariwisata dan pendidikan di tengah pandemi Covid-19 ini vakum.

Sementara itu, Pemda DIY mengandalkan proyek besar dan

padat karya untuk menekan jumlah penduduk miskin. Menurut Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, baik kemiskinan maupun rasio gini memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Karena itu, Pemda DIY berupaya menciptakan pertumbuhan ekonom, dengan harapan bisa mengurangi persentase penduduk miskin dan indeks rasio gini.

Adapun pertumbuhan ekonomi salah satunya didongkrak dengan proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta Jogja-Yogyakarta International Airport dan sebagainya. Kehadiran proyek semacam itu diyakini akan menciptakan ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Hanya saja, lanjut Aji, saat ini proyek itu belum bisa dirasakan manfaatnya terlebih bagi lapisan masyarakat terbawah. Karena itu, upaya lain yang ditempuh untuk menasari elemen masyarakat paling membutuhkan, yakni mengencakan program padat karya. Di samping itu, Pemda juga berupaya memberi bantuan bagi pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19. Ada dua skema bantuan yang pertama memberikan keringanan dalam pembayaran pajak, baik berupa penundaan atau diskon. Kedua, restrukturisasi pinjaman pengelola industri wisata. "OJK memberikan angin baik penundaan bisa sampai 2022," jelas Aji.

Khusus untuk pengelola industri wisata terdampak, Pemda akan mengecek apakah yang bersangkutan sudah termasuk

dalam penerima bantuan sosial baik atau belum.

Anggota Tim Ahli Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Bambang Hidayana, punya pandangan tersendiri. Menurutnya apa yang diyakini pemerintah dengan proyek besar bisa mengatasi kemiskinan tidak sepenuhnya salah, tetapi juga kurang tepat.

Bambang mengatakan setiap proyek infrastruktur apalagi yang berskala besar tidak selamanya memunculkan *trickle-down effect*. *Trickle-down effect* merupakan teori ekonomi yang menyatakan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada pemilik uang yang akhirnya akan merembes ke lapisan masyarakat termiskin. Dengan kata lain, tak semua pihak bakal diuntungkan. Pasti ada yang menjadi korban.

Salah satu contohnya kata Bambang bisa dilihat di YIA. Warga di sana terutama yang tergusur pembangunan memang ada yang dapat mengembangkan usaha sendiri. Namun tak sedikit juga warga yang justru tidak tahu harus berbuat apa. "Jadi secara matematika kita tak bisa memutuskan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan investasi itu terus menimbulkan *trickle-down effect*," ujar Direktur Eksekutif Institut for Research Empowerment (IRE) Jogja itu, Selasa.

Karena itu, Pemda DIY perlu lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Perlu ada pemetaan yang jelas terhadap warga-warga yang bakal merugi.

(Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005